

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bendera merupakan sepotong kain dengan ciri khas tertentu yang sering dikibarkan di tiang. Umumnya bendera digunakan secara simbolis untuk memberikan sinyal atau identifikasi terhadap identitas tertentu. Bendera paling sering digunakan untuk melambangkan suatu negara beserta kedaulatannya. Secara umum, bendera merupakan benda yang dapat menyampaikan suatu konsep simbolis. Bendera negara misalnya, ia merupakan simbol utama suatu bangsa karena bendera berfungsi sebagai ciri dari identitas suatu bangsa. Jika suatu bangsa diibaratkan sebagai manusia, bendera adalah wajahnya. Bendera juga merupakan simbol sebuah pengakuan. Mengecam atau menolak pengakuan terhadap suatu bangsa acap dilakukan dengan pembakaran atau perusakan terhadap bendera bangsa tersebut. (Widiatmoko dan Khairunnisa, 2009: 45).

Bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) adalah suatu visual pada kain yang didesain oleh Hasan Di Tiro, yang digunakan sebagai alat yang berupa simbol dalam usaha melakukan perlawanan dengan pemerintah Indonesia. Bendera ini memiliki unsur visual berupa bulan, bintang, garis hitam, garis putih, dan warna dasar merah. Dikalangan GAM bendera ini biasa disebut dengan bendera *Buleun Bintang* (BB).

Penggunaan visual bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) semakin marak setelah nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) ditandatangani di Helsinki Finlandia antara GAM dengan Pemerintah Indonesia. Orang-orang GAM yang sudah melebur diri menjadi Komite Peralihan Aceh (KPA) hingga kemudian mendirikan Partai Aceh (PA) masih mengadopsi visual bendera GAM sebagai logo organisasinya.

Adanya poin dalam nota kesepahaman *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Pemerintah Indonesia dengan GAM yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia pada 15 Agustus 2005, yang berbunyi; “Aceh memiliki hak untuk menggunakan simbol-simbol wilayah, termasuk bendera, lambang dan

himne” merupakan salah satu celah terhadap penggunaan visualisasi bendera dan lambang GAM di masa damai.

Melalui Poin itu, ada banyak usaha untuk mengadopsi visual bendera dan lambang GAM. Salah satu yang paling menonjol adalah ketika disahkannya bendera dan lambang yang sama seperti yang digunakan GAM oleh Pemerintah Aceh bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh untuk menjadi bendera dan lambang Provinsi Aceh pada Tahun 2013 melalui Undang-undang atau Qanun. Namun demikian, Undang-undang atau Qanun yang dibuat DPRA ini terhambat persetujuan Pemerintah Pusat saat itu, karena bendera dan lambang yang diajukan tersebut dianggap bertentangan dengan PP Nomor 77 dan konstitusi Negara, serta kekhawatiran jika bendera dan lambang itu disahkan, akan lahir konflik bersenjata baru di Aceh.

Selain itu, qanun lambang dan bendera Aceh juga ditentang oleh sebagian masyarakat Aceh terutama yang berdomisili di Pantai Barat, Selatan dan Tengah, karena jelas-jelas menetapkan bendera Bulan Bintang sebagai bendera Aceh. Bendera ini dilihat dari segi bentuk dan warnanya adalah bendera GAM di masa konflik. Sebagian masyarakat Aceh yang berdomisili di luar Pantai Timur itu menentang bendera ini karena menganggap elit pemerintahan Aceh pascakonflik yang didominasi oleh mantan kombatan GAM berusaha menjustifikasi isu di tingkat nasional dan internasional bahwa orang Aceh adalah GAM. Padahal tidak semua orang Aceh adalah GAM. Kuatnya penolakan terhadap dua isu tersebut bahkan menguatkan kembali tuntutan pemekaran provinsi Aceh Leuser Antara (ALA) dan Aceh Barat Selatan (ABAS). Tuntutan yang dinilai oleh mayoritas masyarakat Aceh sebagai ancaman terhadap integrasi Aceh secara teritorial maupun etno-nasionalisme. (Nirzalin dan Fakhurrrazi, 2014: 92-93).

Hingga sekarang, tercatat bendera partai lokal yang didirikan Kombatan GAM yang bernama Partai Aceh (PA) juga telah mengadopsi visual bendera GAM, walaupun sedikit mengalami perubahan, karena awalnya pernah ditentang oleh berbagai pihak. Polemik tentang penggunaan bendera dan lambang GAM setelah damai masih terjadi sampai sekarang.

Cara pandang yang berbeda antara pemerintah Indonesia dan kombatan GAM belum menemui titik temu hingga sekarang. Antara GAM dan pemerintah Indonesia sama-sama masih memaksakan kehendaknya antara yang menolak dan menerima. Ketika bendera yang sudah disetujui pemerintah Aceh bersama DPRA dinaikkan di Aceh, Pemerintah Indonesia melalui instansi kepolisiannya akan secara langsung menurunkan bendera tersebut, karena bagi pemerintah Indonesia, bendera GAM tersebut tidak boleh lagi digunakan setelah perjanjian damai ditandatangani.



Gambar. 1. Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh menyampaikan orasi terkait bendera, (Sumber: <https://www.antaraneews.com/foto/43029/bendera-aceh>, diakses pada 12 Agustus 2017)

Sikap pemerintah Indonesia sangat berbeda dengan sikap kombatan GAM yang sekarang menguasai pemerintahan di Aceh, mereka menganggap bahwa bendera maupun lambang itu tidak ada masalah untuk digunakan, karena memuat sejarah panjang perjuangan mereka sebelum menuju perdamaian Aceh. Antara bendera dan lambing dan antara pengguna dengan penentang dalam kondisi setelah penandatanganan MoU Helsinki masih terus terjadi hingga sekarang.

Munculnya polemik bendera dan lambang di masa damai ini tidak lepas dari pemaknaan yang beragam dari pembaca pesan, dan bukan mengenai persoalan hukum semata. Hukum dalam pusaran konflik ini hanya menjadi alasan semata. Bendera dan lambang sebagai suatu kumpulan tanda yang berbentuk visual

tersebut telah dimaknai secara berbeda oleh kedua belah pihak. Di lain sisi, makna dari bendera dan lambang GAM tersebut telah berubah, karena telah berada dalam ruang dan waktu yang berbeda, yaitu di masa setelah perdamaian, walaupun dari pihak yang bertikai, pemaknaan ulang itu sangat sulit dilakukan, terlebih karena mereka masih menyimpan ingatan tentang permusuhan di masa lalu, dan menganggap bahwa setiap simbol yang pernah hadir di masa konflik tersebut telah memiliki arti penting dalam hidup mereka. Mitos tentang masa lalu tentunya sangat mempengaruhi pola pikir mereka dalam memaknai visual bendera dan lambang GAM.

Penggunaan bendera secara khusus dalam berbagai momen di masa damai telah memperumit pemaknaan ulang terhadap visual bendera itu sendiri. Contoh yang paling segar adalah ketika visual bendera itu dihadirkan oleh Front Pembela Islam (FPI) Aceh pada saat demo 4 November 2016 di Jakarta. Hadirnya visual bendera tersebut disertai dengan adanya tulisan pernyataan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menyikapi hal itu, Kepolisian Republik Indonesia melalui Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Mochamad Iriawan langsung menyita atribut yang dianggap bernada provokasi itu. Ia juga menyampaikan tegurannya kepada pimpinan demo 4 November 2016, Habib Rizieq. Menurutnya, kemunculan bendera GAM tersebut cukup disesalkan. Sebab kepolisian telah mengimbau agar para pendemo untuk tidak memunculkan hal-hal yang berbau provokasi. (metro.news.viva.co.id, 2016. Diakses pada 22 Januari 2017).

Penelitian ini akan mengkaji tentang bagaimana sebuah tanda yang hadir lewat bentuk visual bendera itu dimaknai dalam konteks di masa damai, dengan menggunakan metodologi kualitatif dan pendekatan teori Desain komunikasi Visual, teori semiotika Roland Barthes, serta teori sosilogi pengetahuan Karl Mannheim. Dalam hal ini, hanya visualisasi bendera GAM saja yang akan dikaji dengan pendekatan di atas.

Hadirnya berbagai visual bendera dan lambang dalam ruang atau tema di masa damai yang menimbulkan berbagai kontroversi itu sangat dimungkinkan terjadi karena makna atas visual tanda tersebut masih dipahami dalam konteks

konflik dan belum dimaknai dalam konteks baru, yaitu makna yang sangat terikat pada MoU Helsinki.

Terkait dengan bendera dan lambang GAM sendiri, Indra Jaya Piliang pernah meneliti tentang ini di Aceh, yang kemudian tulisannya tersebut dituangkan ke dalam buku yang berjudul *Bouraq-Singa Kontra Garuda; Pengaruh Sistem Lambang dalam Separatisme GAM terhadap RI (2010)*. Buku tersebut mengupas tentang makna simbol serta lambang GAM yang digunakan ketika berperang melawan pemerintah Indonesia. Namun demikian, Indra Jaya Piliang hanya memaparkan makna atau filosofi dari lambang dan simbol GAM dengan pendekatan semiotika semata, akan tetapi tidak membahas konteks makna yang diikat oleh ruang perdamaian. Apalagi mengkajinya ideologi dan mitos yang tersimpan di balik bendera tersebut pasca MoU Helsinki.

Maka dari itu, penelitian ini nantinya akan mencoba masuk lebih jauh untuk menemukan pesan yang berupa makna, ideologi dan mitos yang tersembunyi di balik bendera GAM setelah ditandatanganinya MoU Helsinki. Harapannya adalah bahwa setelah penelitian ini dilakukan, dapat bermanfaat bagi ilmu Desain Komunikasi Visual, terutama mengenai pembahasan mengenai visual bendera separatisme setelah proses perdamaian.

#### B. Alasan dan arti penting topik

Pemilihan topik ini berangkat dari adanya berbagai polemik dari beragamnya tafsir atas bendera GAM pasca MoU Helsinki. Polemik tersebut oleh sebagian orang dianggap hanya sebagai persoalan hukum dan politik semata, tanpa melihatnya sebagai persoalan pembacaan yang tidak tepat atas bendera itu sendiri. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai bendera tersebut, untuk mengetahui makna yang sebenarnya dari bendera tersebut, yang sangat terikat dengan ruang dimana bendera itu dioperasikan.

Polemik bendera GAM tentunya bukan saja persoalan hukum dan politik semata, namun merupakan persoalan dari bendera itu sendiri, yaitu komunikasi visual. Maka dari itu, ia harus dikaji ulang melalui proses pembongkaran dan serangkaian pembacaan ulang atas makna. Sebagai persoalan visual, tentu bendera

tidak dapat dilepaskan dari persoalan ruang, makna, mitos, dan ideologi yang melekat padanya sebagai nilai. Sebuah bahasa tanda, ketika ia berada dalam ruang berbeda, tentu akan mengalami pembaharuan makna dan dapat dipahami secara berbeda pula, seperti yang diungkapkan dalam buku Pengantar Semiotika Tanda-tanda dalam Kebudayaan Kontemporer (Berger, 2010: 59), bahwa permasalahan yang dihadapi orang perihal tanda adalah, bahwa tanda dapat sesuai dengan maksudnya, namun tak akan sesuai lagi bila terjadi ketumpangtindihan, karena tanda itu akan kehilangan kemampuan untuk menyampaikan informasi secara memadai. Mengacu pada hal di atas, penulis tertarik mengkaji bendera dan lambang dengan pendekatan Desain Komunikasi Visual, semiotika dan sosiologi, untuk memahami makna, mitos, dan ideologi yang terkandung dalam bahasa visual bendera dan lambang GAM setelah MOU Helsinki.

Kajian tentang visual bendera dalam konteks di masa damai ini, selain belum pernah dikaji sebelumnya, juga menarik untuk diteliti sebagai pemecahan masalah komunikasi visual. Sebuah tanda yang berupa bendera tidak dapat hanya dipahami sebagai permasalahan estetika, hukum dan politik semata, namun harus dapat dilihat lewat perspektif komunikasi visual, ilmu tanda dan sosiologi.

#### C. Rumusan Masalah

Bagaimana memahami makna konotasi, mitos dan ideologi dari visual bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) setelah *Memorandum of Understanding* (MoU) Helsinki?

#### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

##### 1. Tujuan Penelitian

Memahami makna konotasi, mitos dan ideologi dari visual bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) setelah *Memorandum of Understanding* (MoU) Helsinki.

##### 2. Manfaat Penelitian

###### a. Secara Teoretis

Secara teoritis, penelitian ini akan menambah referensi keilmuan dalam bidang ilmu Desain Komunikasi Visual (DKV), khususnya

mengenai kajian visual bendera. Dalam hal ini adalah visual bendera GAM di masa setelah MoU Helsinki, yang dikaji dengan pendekatan teori Desain Komunikasi Visual, semiotika Roland Barthes, dan sosiologi pengetahuan Karl Mannheim.

b. Secara Praktis

- 1) Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pemahaman masyarakat, khususnya pemahaman terhadap makna konotasi, ideologi dan mitos yang ada dalam bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang selama ini cenderung dimaknai secara hukum dan politik semata.
- 2) Bagi pengguna bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM), penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penggunaannya, baik untuk mengontruksi makna ataupun aplikasi bendera tersebut ke dalam media-media lainnya di masa setelah MoU Helsinki.
- 3) Bagi civitas akademika, adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah literature, yang dapat berguna bagi dosen maupun mahasiswa, khususnya yang berkecimpung dalam bidang kajian visual tanda dalam ruang-ruang tertentu.

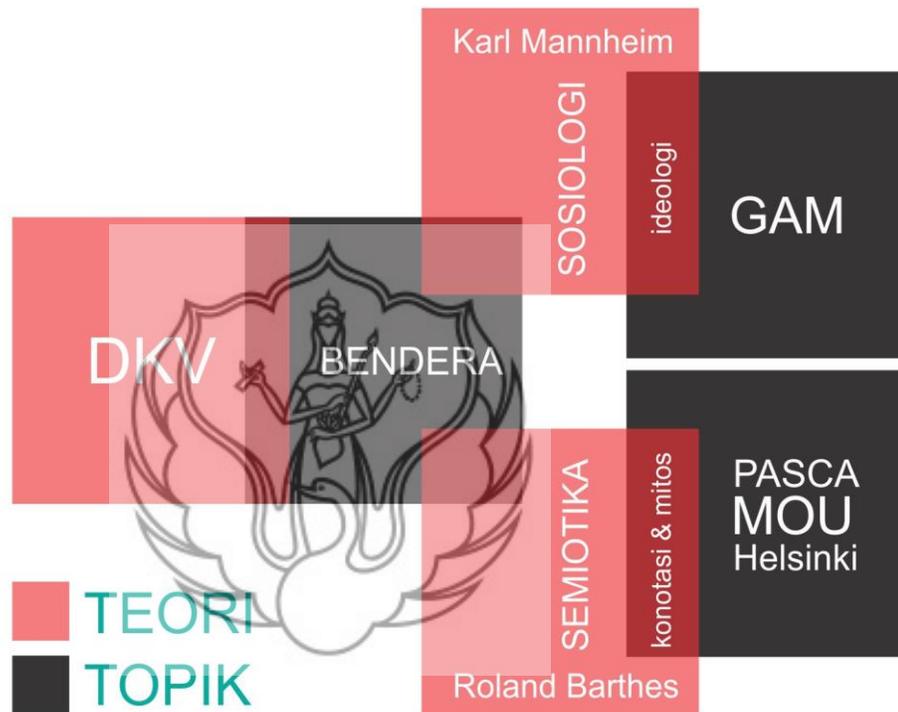
E. Batasan Masalah

Pembahasan akan difokuskan pada visual bendera GAM, dengan menggunakan teori Desain Komunikasi Visual, teori semiotika Roland Barthes, serta teori sosiologi pengetahuan Karl Mannheim.

F. Pertanyaan Penelitian

1. Seperti apa bendera GAM dan penggunaannya sebelum dan setelah MoU Helsinki?
2. Bagaimana makna konotasi, mitos, dan ideologi yang ada dalam bendera GAM pasca MoU Helsinki.

G. Mind Mapping



Gambar 2. Mind Mapping  
(dibuat: Iskandar, 16 Desember 2017)